



Dadang Solihin
Rektor Universitas Darma Persada



Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem

Launching E_Planning & PPAS Online Kota Padang
Pangeran Beach Hotel-Padang, 19 Januari 2016



INTAH
ADANG





DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Sistem Manajemen Pembangunan
- Sistem Perencanaan Pembangunan
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- E_Government
- Anugerah Pangripta Nusantara



Sistem Manajemen Pembangunan





Sistem Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan: **SMART**

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas





Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

visit
ranah
minang
2010
/bow

Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:

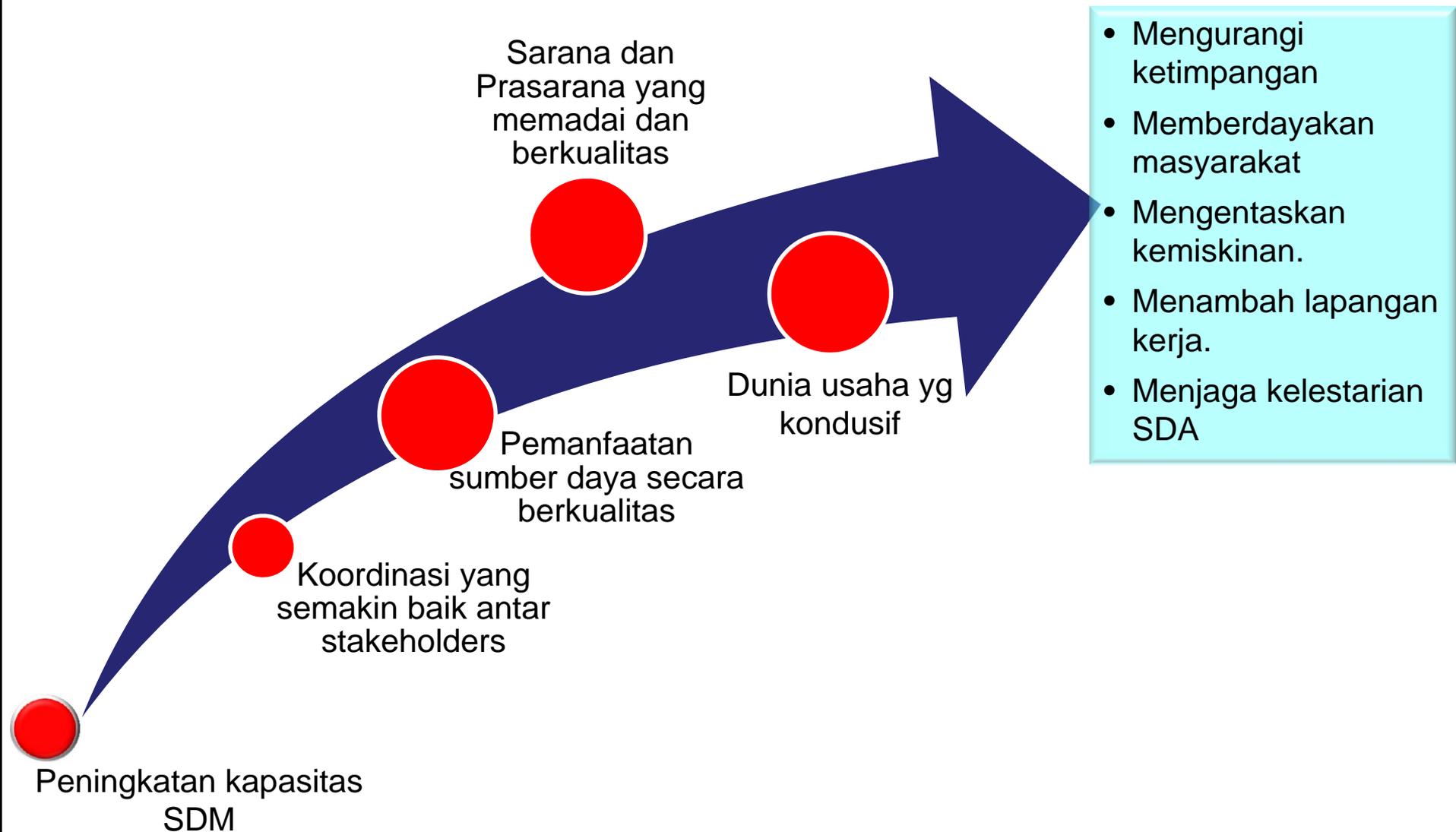
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.



Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

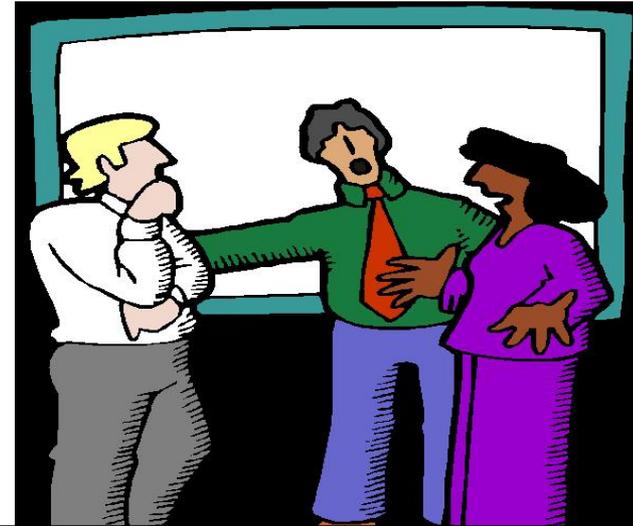
Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government

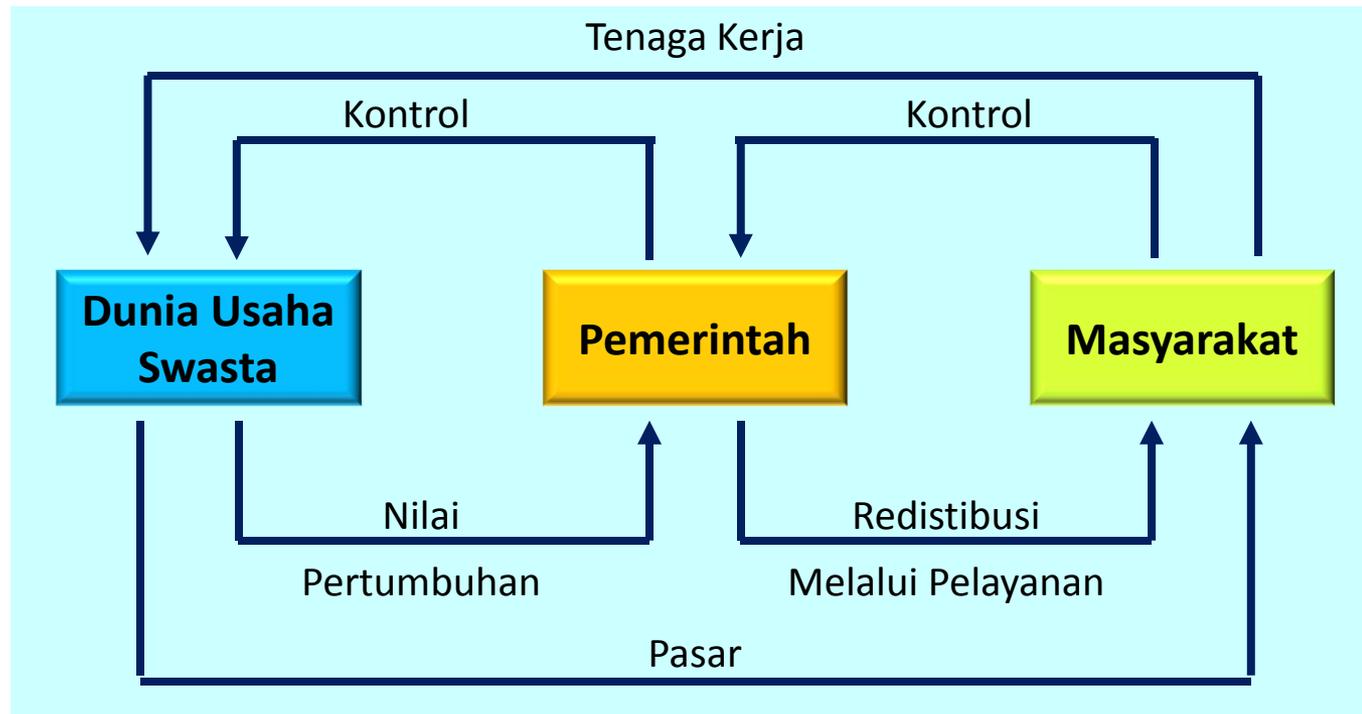
- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

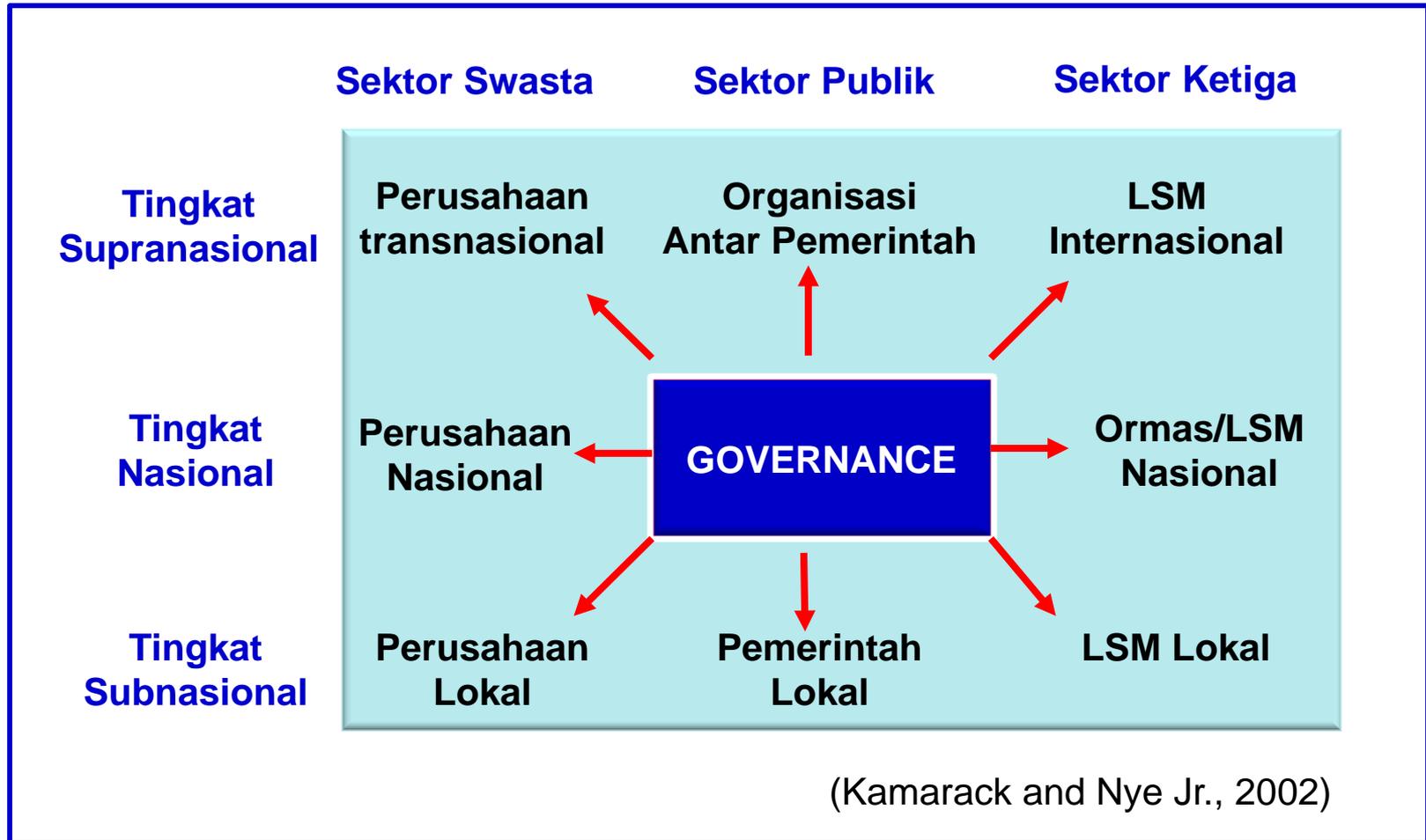
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

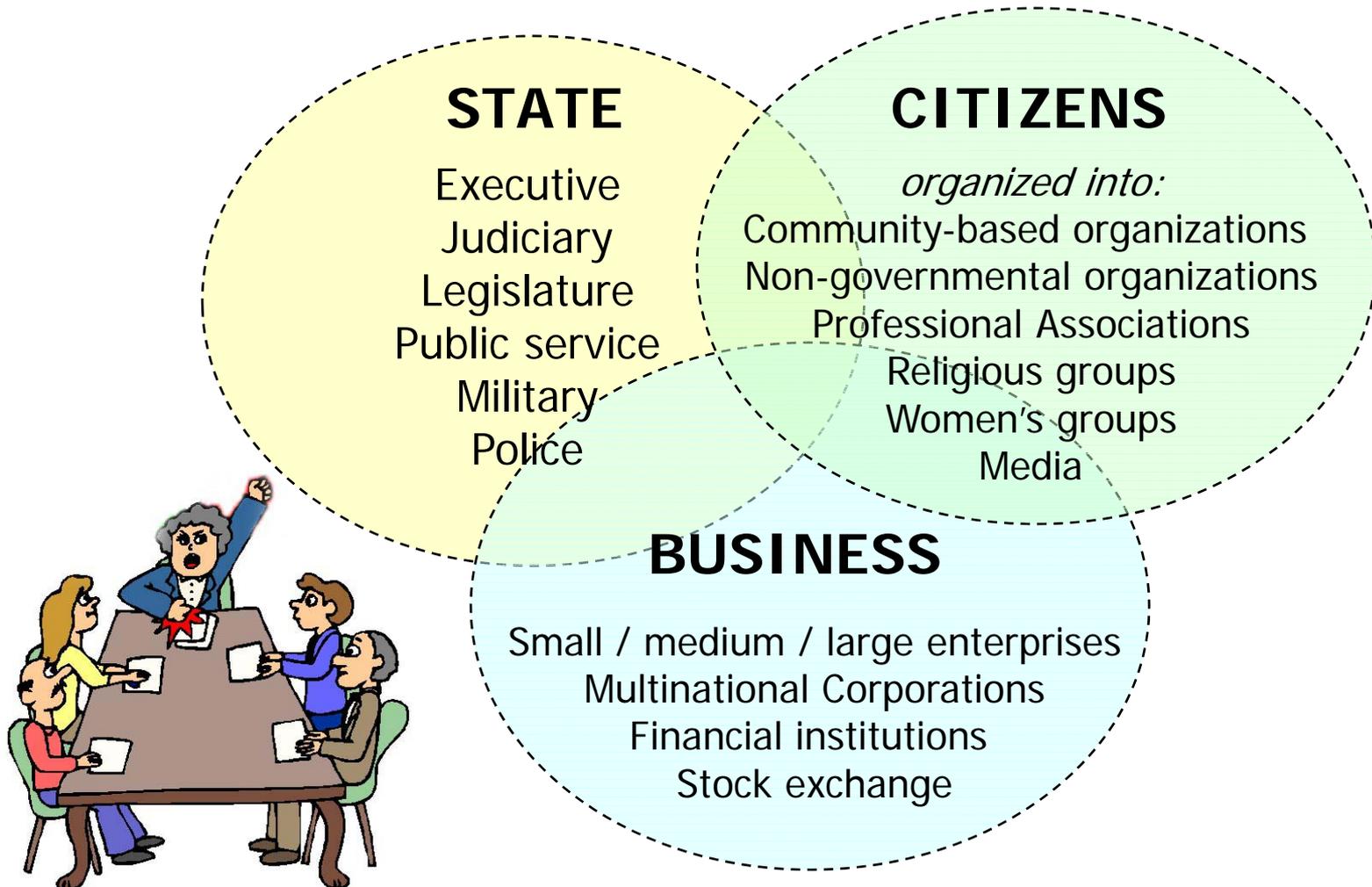


- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

Model Governance



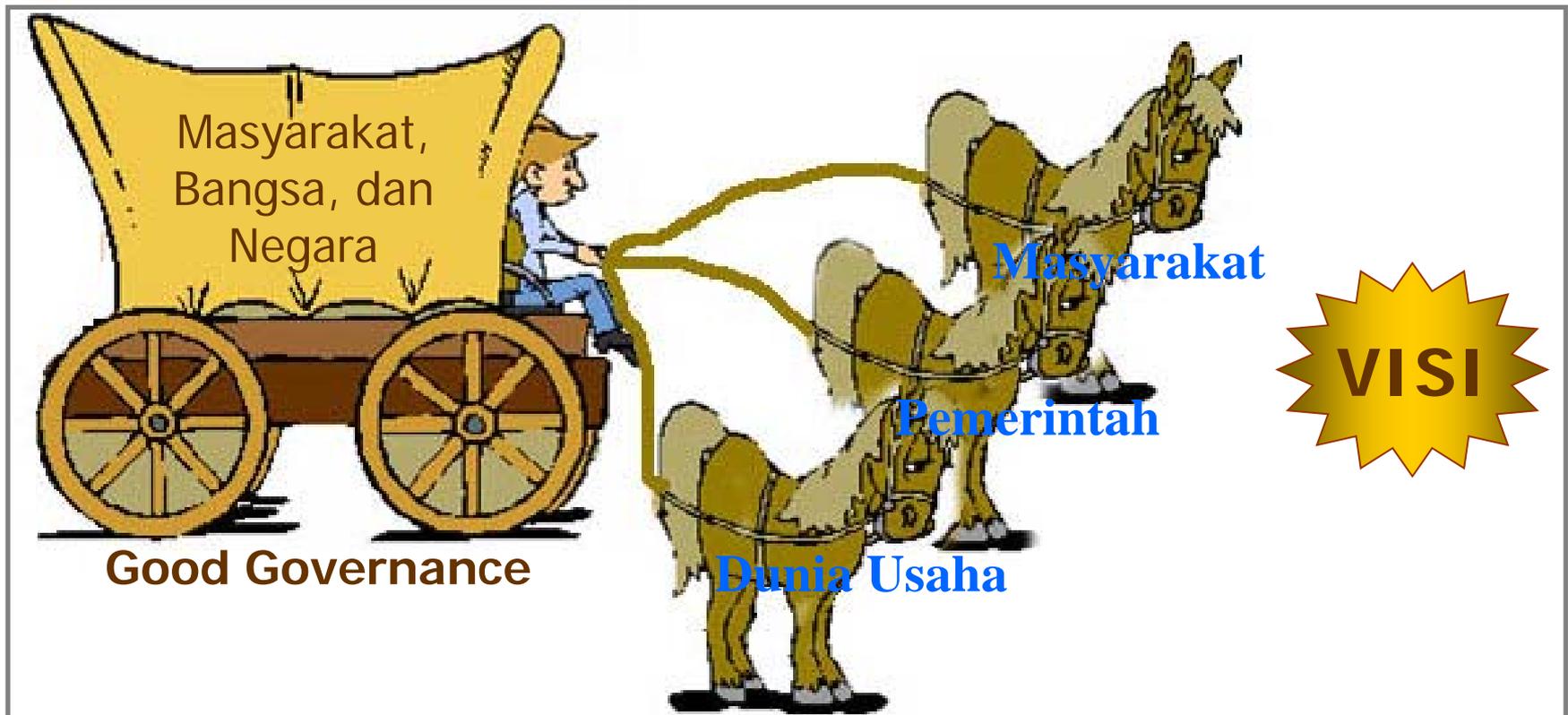
Pelaku Pembangunan: Stakeholders



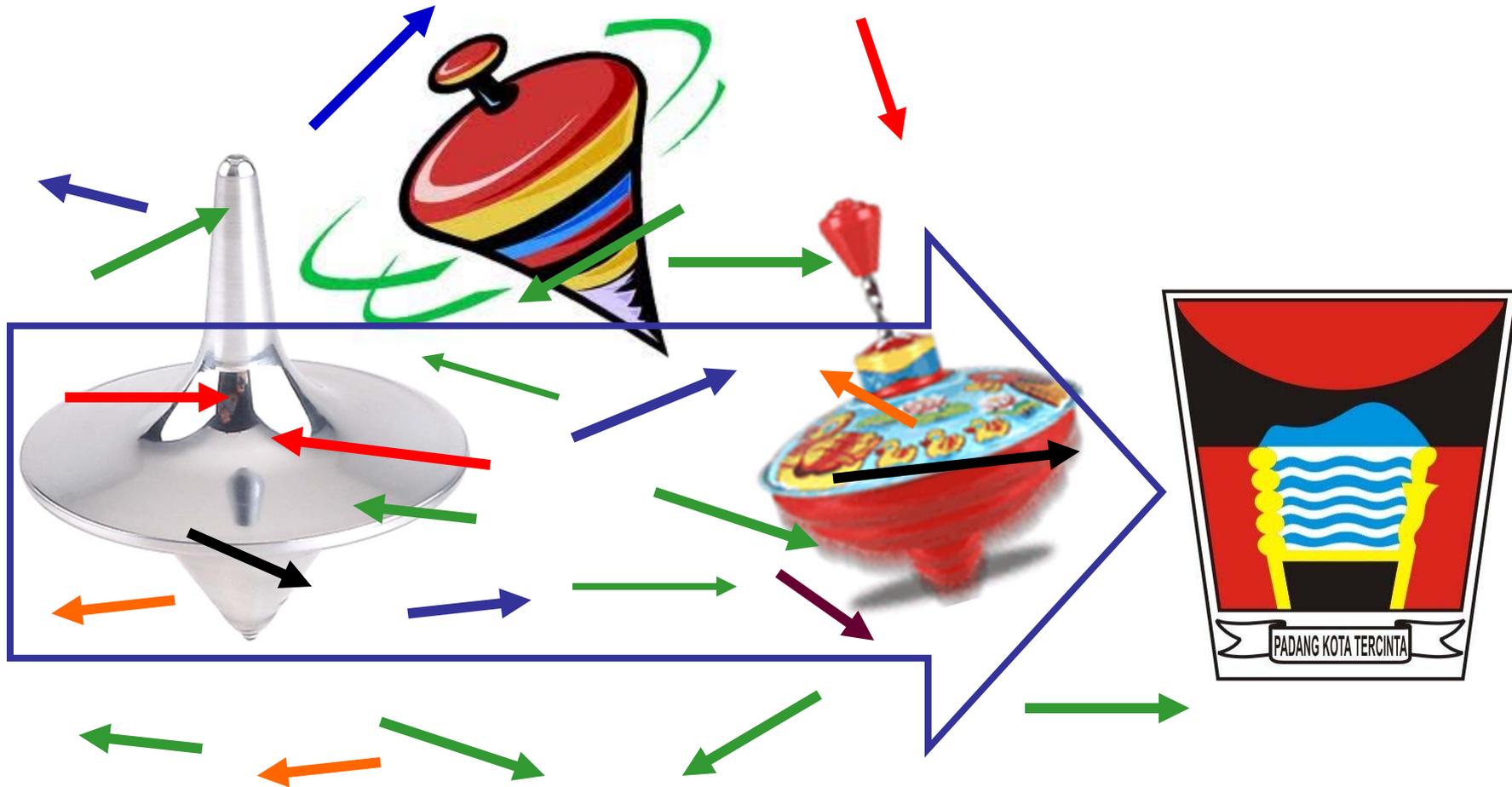
Troika



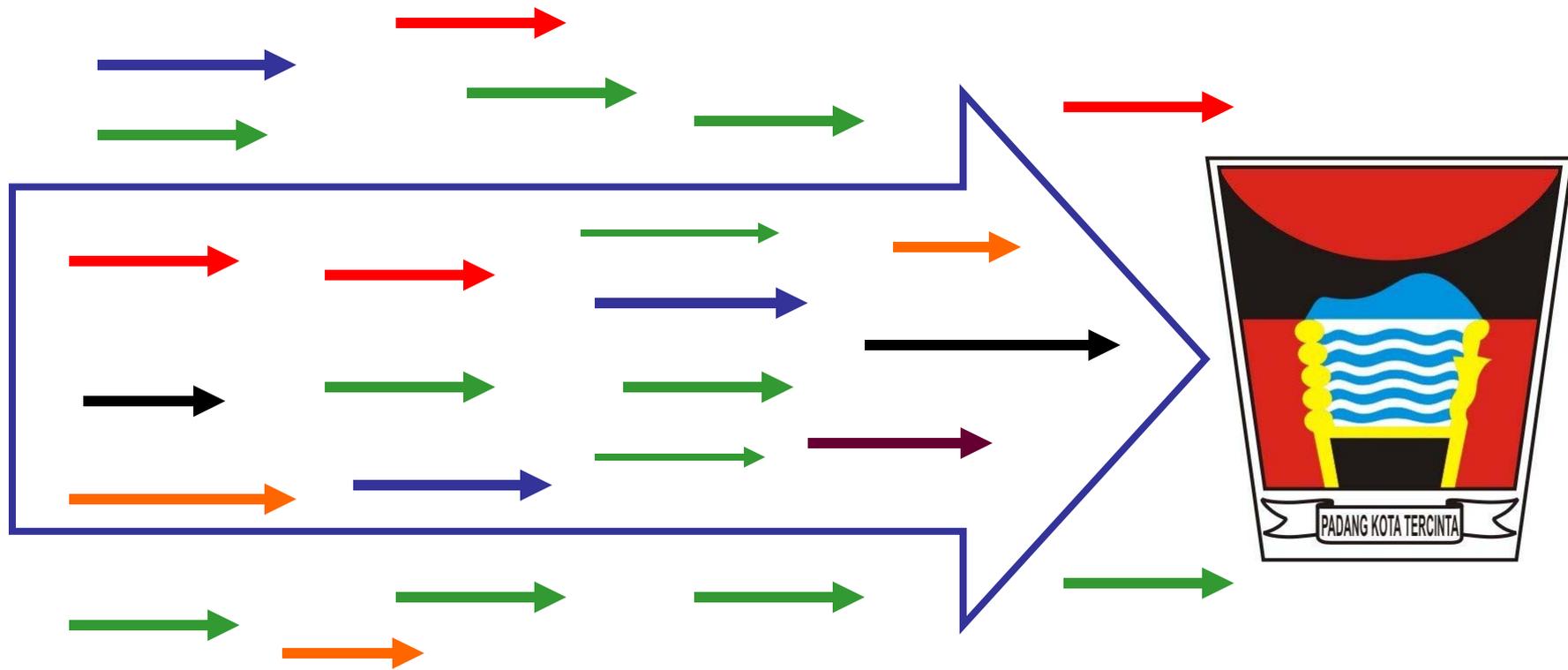
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi Stakeholders





E_Government



Konsep e-government



- E-gov merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*); yang
- Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); *dengan tujuan*
- Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

Implementasi

- **Penyediaan sumber informasi**
 - Sangat penting dalam otonomi daerah
 - Memberi informasi untuk investor
 - Apa potensi daerah anda? Komoditas? Fasilitas? Kemudahan?
 - Berapa jumlah SMU, Perguruan Tinggi beserta rangkingnya? Bagaimana dengan *continuing education*? *Training center*?
- **Penyediaan mekanisme akses**
 - Penetrasi komputer (PC) & telepon masih rendah, biaya/harga mahal, daya beli rendah
 - Menggunakan kios info di kantor dan tempat umum
- **E-procurement (G2B)**
 - Transparansi
 - Koordinasi antar institusi
 - Teleconference menghilangkan batas ruang
 - Rapat regional dapat dilangsungkan via teleconferencing

Manfaat E_Govt

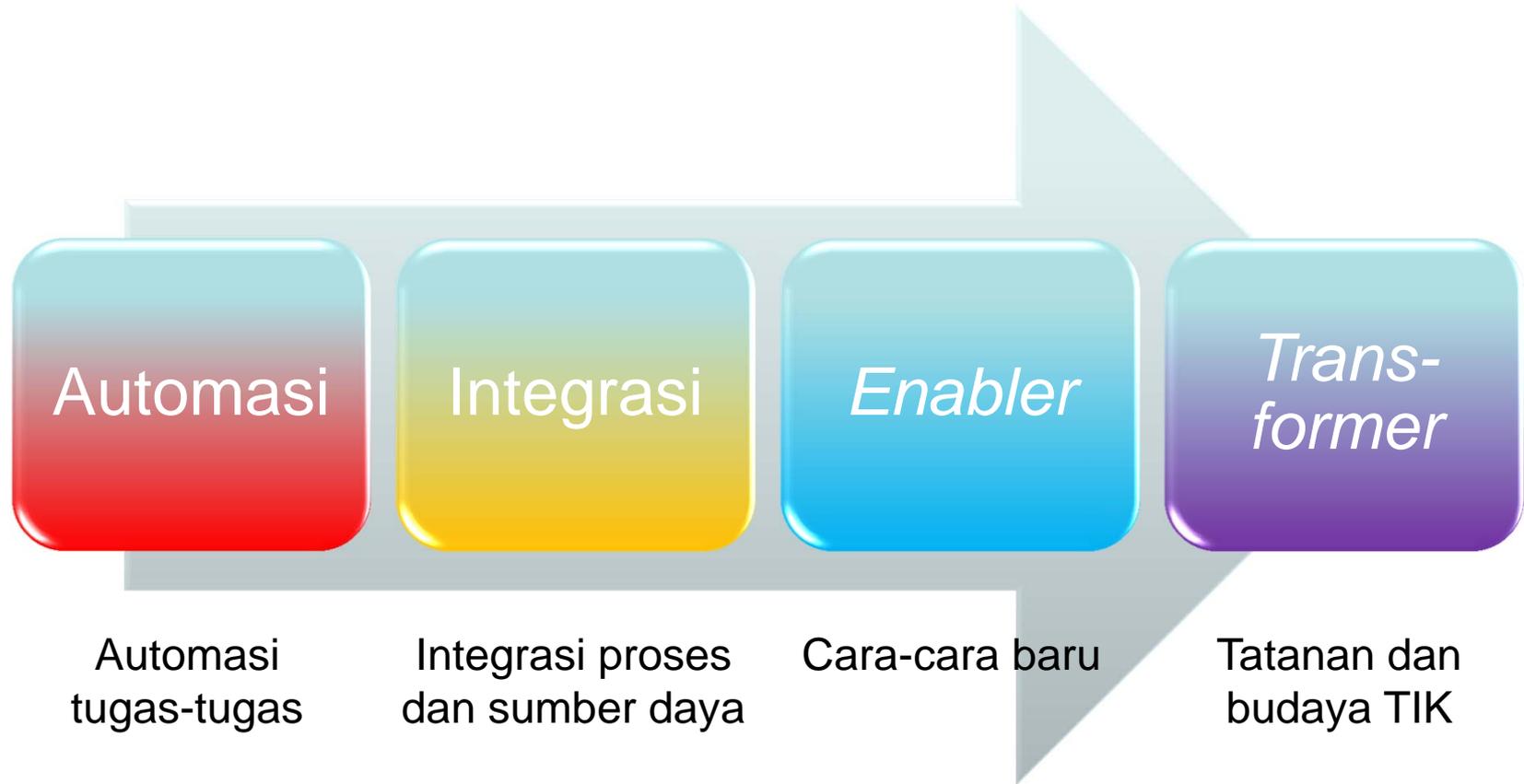
- Peningkatan pelayanan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat
- Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien



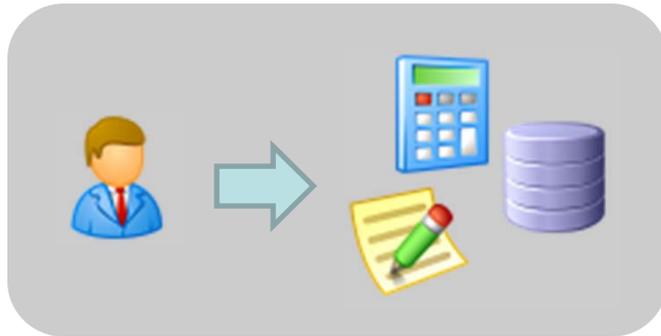
Tabel 1. Perubahan pada Proses Kerja Pemerintah dalam e-Government

Sebelum	Sesudah
Proses kerja pemerintah menggunakan kertas	Proses dokumen berbasis elektronik
Prosedur berorientasi departemen	Prosedur berorientasi pelayanan
Banyaknya jalur kontak ke pemerintah dan kunjungan personal (tatap muka) ke kantor-kantor pemerintah	Jalur kontak tunggal dan akses <i>online</i> , sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan
Manajemen sumber daya informasi tingkat departemen, dengan banyaknya duplikasi dan pemborosan antar departemen yang berbeda	Manajemen sumber daya informasi terintegrasi menggunakan standar umum dan ditandai dengan konvergensi

Peran TIK dalam E-Government



Peran TIK: Automasi



Pemakai melaksanakan tugas-tugasnya secara manual



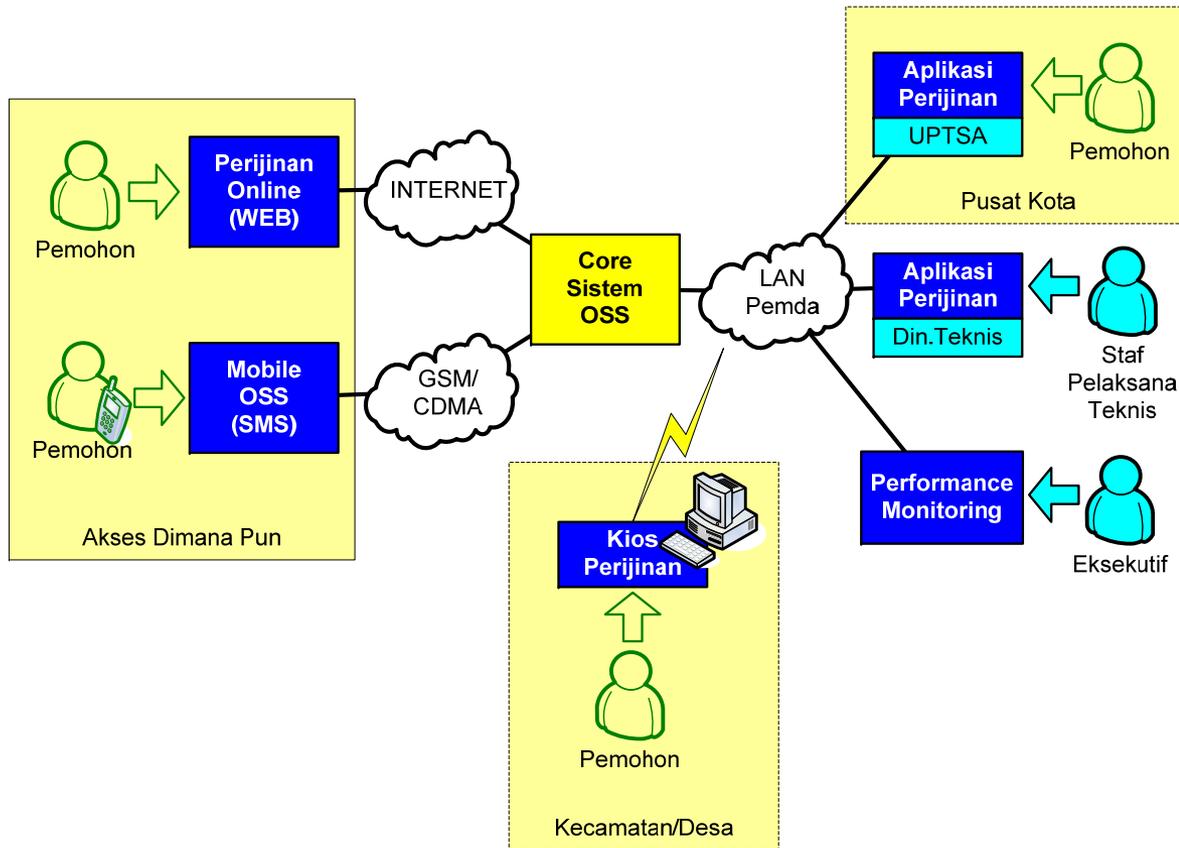
Komputer membantu pemakai melaksanakan tugas-tugasnya

Peran TIK: Automasi

- Pembuatan dokumen-dokumen kerja
- Kalkulasi data numeris (keuangan, hasil survey, sensus, dsb)
- Pemrosesan informasi (laporan-laporan terpadu, ringkasan eksekutif)
- Pemasukan, penyimpanan, organisasi, dan pencarian data dalam jumlah besar (pegawai, aset, keuangan, dsb)
- Desain grafis dan visual (presentasi, desain arsitektur, gambar kerja, dsb)
- Transfer dan pengiriman data (secara elektronik)
- Pemantauan dan evaluasi *real-time* (gunung api, longsor)

Peran TIK: Integrator

Sistem Pelayanan Satu Atap

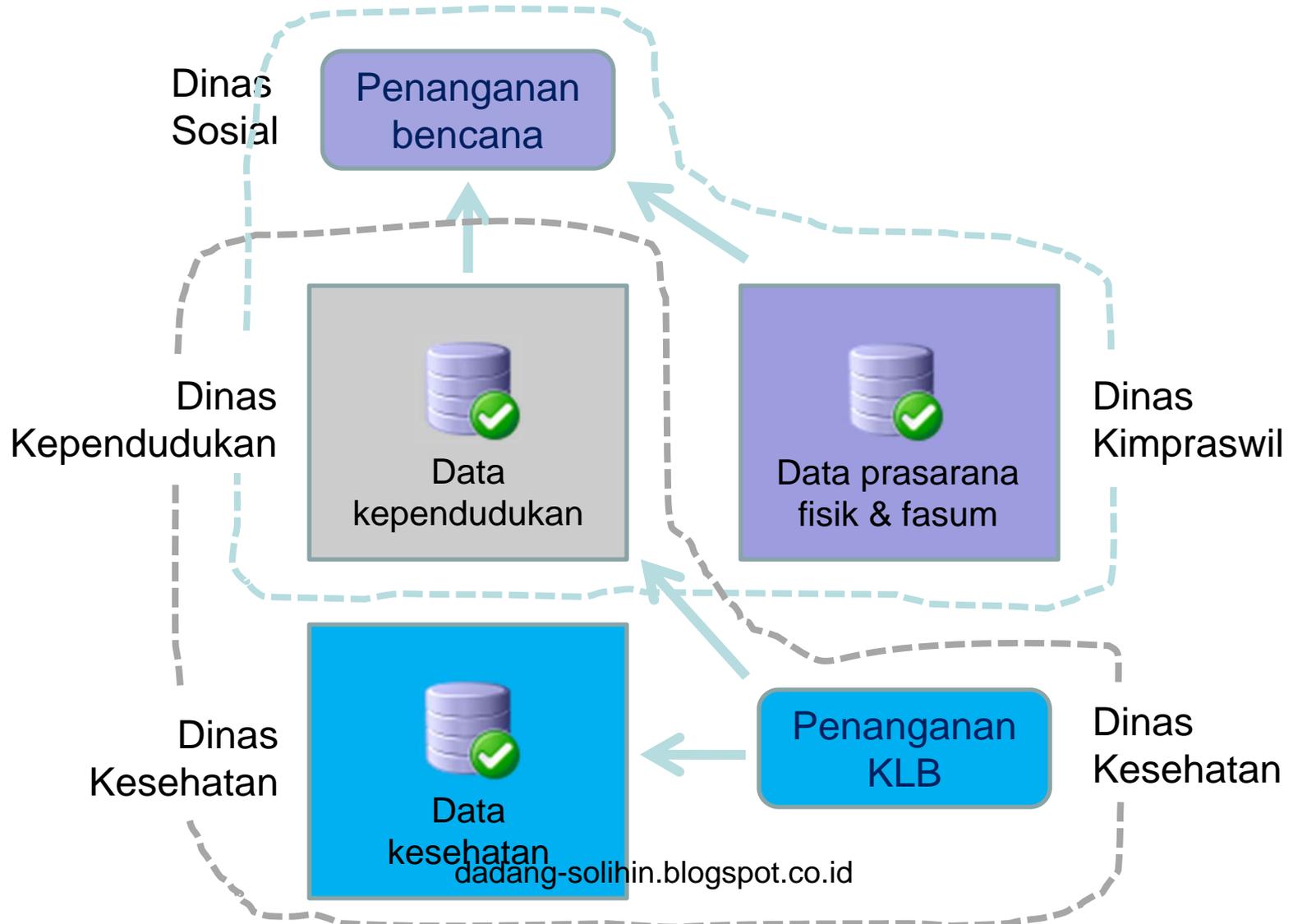


- Banyak unit
- Kewenangan yang berbeda-beda
- Proses birokrasi yang berlainan
- Banyak data

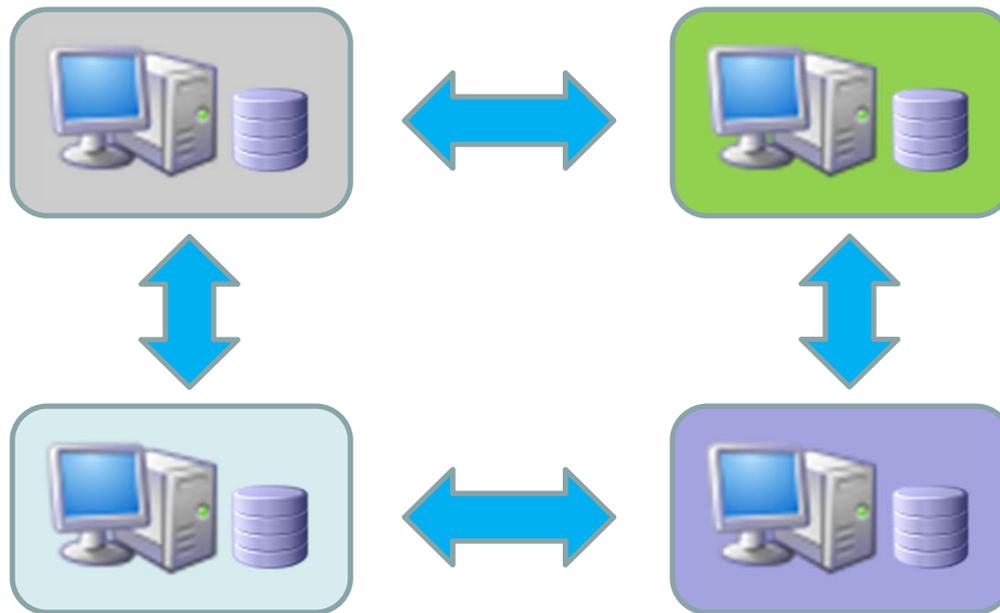


Pemakai melihatnya sebagai **satu** layanan

Integrasi: Pemakaian Data Bersama



Integrasi: Komunikasi antar Aplikasi

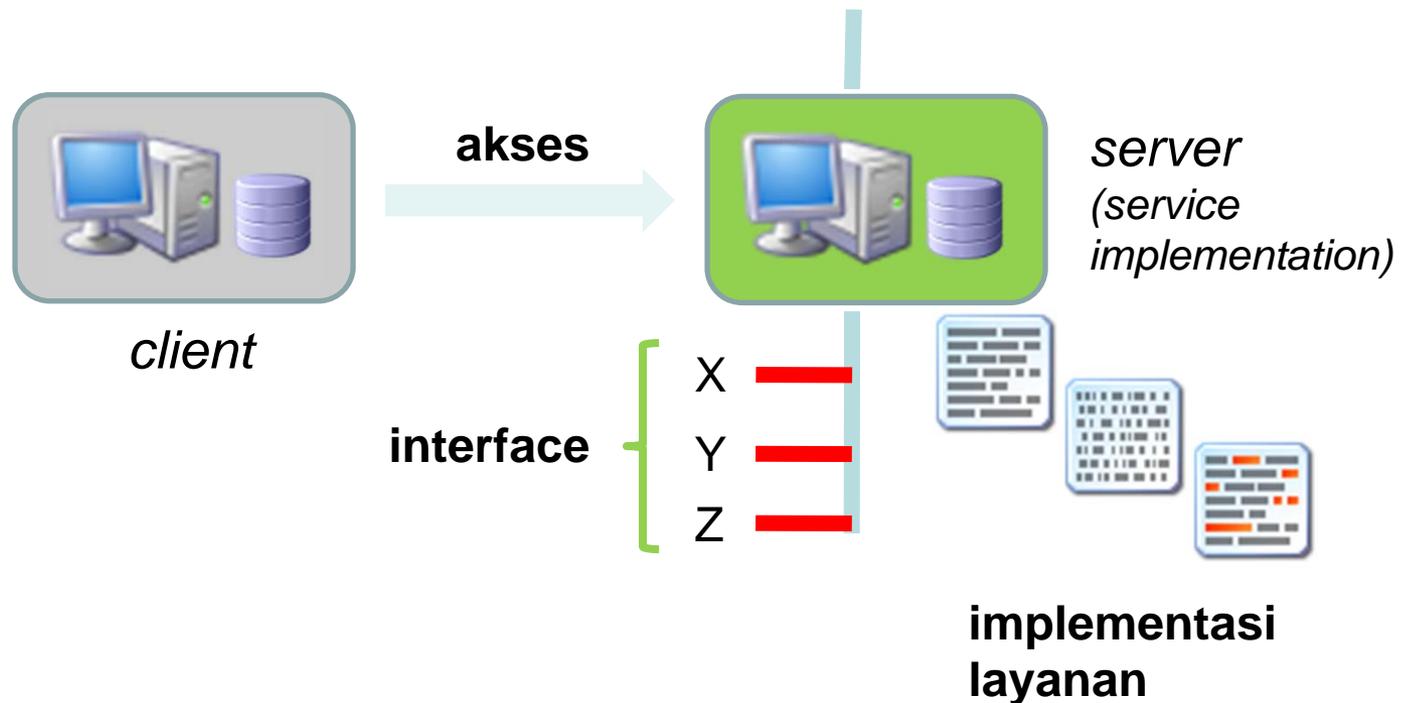


Sistem dan aplikasi dengan platform (hardware, sistem operasi, dan software) yang berbeda-beda

Isu pokok: kebutuhan untuk saling berkomunikasi tanpa harus mengetahui aspek internal dan memaksakan kesamaan platform

Teknologi Integrasi

Aplikasi client tidak harus sama dengan aplikasi server. Untuk mengkomunikasikan keduanya tidak perlu harus mengetahui detail desain internal masing-masing.



Isu-Isu dalam Integrasi



- Hak akses (siapa boleh mengakses apa)
- Keamanan sistem
- Format data
- Kepemilikan dan kewenangan terhadap data
- Koordinasi dan kesepakatan dalam integrasi

Perencanaan TIK

If you fail to plan, you plan to fail

Efek dari kegagalan dalam perencanaan adalah tidak tercapainya fungsi TIK sebagai pendukung tugas/kegiatan, malah menjadi beban & pemborosan.

Tahapan Perencanaan TIK



Prinsip Desain Program TIK

- Efektifitas – menuju pada sasaran pencapaian tujuan → **spesifikasi** harus jelas
- Efisiensi – sumber dana yang tersedia selalu tidak tak terbatas → **alokasi** yang optimal
- Kontinuitas – umumnya program-program TIK saling terkait → **konsistensi urutan** implementasi program
- Keberlanjutan – terutama terkait dengan program-program berjangka panjang → **kepastian** anggaran dan sumber daya lainnya

Prinsip Implementasi Program

- TIK sebagai pendukung, bukan tujuan
 - Jangan sampai terjebak oleh tujuan semu
- Perhatikan realitas yang ada
 - Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya
- Partisipasi masyarakat dalam program-program TIK
 - Menumbuhkan rasa ikut memiliki
- Perhatikan kesederhanaan dan kemudahan
 - Kesederhanaan akan menumbuhkan partisipasi



Anugerah Pangripta Nusantara

Pendahuluan

- Sesuai UU SPPN No 25/2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
- Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan.
 - Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik.
- Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan.

Tahapan dan Kriteria Penilaian RKPD

Penilaian Tahap I terhadap dokumen RKPD yang menghasilkan Daerah nominasi (BOBOT 30%)

1. Keterkaitan
2. Konsistensi
3. Kelengkapan dan Kedalaman
4. Keterukuran

Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan Daerah nominasi (BOBOT 30%)

1. Proses Perencanaan dari Bawah (*bottom-up*)
2. Proses Perencanaan dari Atas (*top-down*)
3. Proses Perencanaan *Teknokratik*
4. Proses Perencanaan *Politik*
5. *Inovasi*

Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap Daerah nominasi (BOBOT 40%)

1. Keterkaitan
2. Konsistensi
3. Kelengkapan dan Kedalaman
4. Keterukuran
5. Proses Perencanaan dari Bawah (*bottom-up*)
6. Proses Perencanaan dari Atas (*top-down*)
7. Proses Perencanaan *Teknokratik*
8. Proses Perencanaan *Politik*
9. *Inovasi*
10. Tampilan dan Materi Presentasi
11. Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi

Kriteria Penilaian Tahap I

dokumen RKPD yang menghasilkan Daerah nominasi (Bobot 30%)

NO.	KRITERIA	INDIKATOR
1.	KETERKAITAN	1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD 2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP
2.	KONSISTENSI	3. Tersedianya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dengan isu strategis 4. Tersedianya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan 5. Tersedianya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan pagu anggaran SKPD 6. Tersedianya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan program/kegiatan SKPD
3.	KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 9. Tersedianya analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kabupaten/kota 10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya 11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya 12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya 13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya 14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan MDG's berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
4.	KETERUKURAN	15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik 16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya.

Kriteria Penilaian Tahap II

Verifikasi Proses Penyusunan RKPD (Bobot 30%)

KRITERIA	PARAMETER	INDIKATOR
DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%)	1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RKPD	Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang menjadi kegiatan RKPD (12,5%)
	2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD (12,5%)
DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%)	3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD dan Prioritas Nasional dalam RKP	Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD dengan RKP (10%)
	4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD dan RKP	Persentase program dan kegiatan RKPD yang mendukung RKP (10%)
TEKNOKRATIK (20%)	5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD	Persentase program dan kegiatan RKPD yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%)
	6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyusunan RKPD	Tingkat kapasitas perencana Bappeda dalam penyusunan RKPD (10%)
POLITIK (20%)	7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD	Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD dengan usulan DPRD (10%)
	8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD	Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%)
INOVASI (15%)	9. Inovasi pada proses perencanaan	Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensional (7,5%)
	10. Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan	Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada kebijakan dan program, pembangunan, contoh terkait dengan regulasi, efisiensi pembiayaan (7,5%)

Kriteria Penilaian Tahap III

Presentasi dan Wawancara (Bobot 40%)

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	KETERKAITAN	5%
2.	KONSISTENSI	5%
3.	KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	5%
4.	KETERUKURAN	5%
5.	DARI BAWAH (BOTTOM-UP)	5%
6.	DARI ATAS (TOP-DOWN)	5%
7.	TEKNOKRATIK	5%
8.	POLITIK	5%
9.	INOVASI	5%
10.	TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI Visualisasi (tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT	25%
11.	KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI pengetahuan tentang RPJMN 2015-2019, institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu	30%



Terima Kasih